

BAB V

KESIMPULAN

Gempa dan Tsunami yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember tahun 2004 merupakan peristiwa bencana besar yang membuat Indonesia sangat terpukul karena jumlah korban jiwa yang besar, kerusakan dan kerugian ekonomi yang mencapai milyaran rupiah. Akibat besarnya jumlah korban dan kerusakan fisik maka bencana gempa dan tsunami ini dapat diklasifikasi sebagai bencana nasional karena sifat kerugian massif kerugian baik kerugian materil maupun juga imateril. Peristiwa gempa dan tsunami Aceh telah memberikan pelajaran besar bagi Indonesia dan dunia bahwa bencana tidak dapat diprediksi terjadinya sehingga setiap negara sangat membutuhkan persiapan dan upaya yang matang dalam mencegah kerugian bencana. Upaya yang dilakukan negara dalam mencegah timbulkan kerugian besar akibat bencana disebut dengan “*Disaster Risk Reduction*”.

Kontribusi Jepang dinilai sangatlah positif sebagai solusi pihak yang memberikan kontribusi dalam hal rehabilitasi serta peningkatan mutu penanggulangan bencana alam di Indonesia. Dalam kasus bencana gempa dan tsunami Aceh, negara Jepang adalah merupakan negara yang berperan besar dan penting dalam pemulihan kerusakan karena memiliki latar belakang yang hampir sama yaitu sebagai negara yang rawan dan sering terkena bencana alam. Adapun motif Jepang dalam pemberian bantuan kemanusiaan sekaligus menjadi momen tersebut sebagai upaya meningkatkan diplomasi kebencanaan dikancah internasional, Jepang juga aktif memberikan bantuan asistensi kepada Indonesia secara materil maupun imateril yang berkaitan dengan penanggulangan kebencanaan sekaligus sebagai mentor oleh pihak Indonesia, agar kedepannya pihak Indonesia dapat mandiri ketika mengalami kondisi serta situasi yang sama.

Jepang telah terkenal sebagai negara yang aktif memberikan bantuan luar negeri kepada berbagai negara terutama negara-negara yang berada di ASEAN, pasca perang dunia kedua. Jepang menggunakan diplomasi kebencanaan dengan mengembangkan ODA (*Official Development Assitance*) hingga akhirnya bergabung dengan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and*

Development) dengan alasan membayar kerugian perang terdahulu. Dibalik pendistribusian bantuan, Jepang secara tidak langsung berdiplomasi guna mengabarkan dan menunjukkan pada dunia internasional bahwa Jepang telah maju karena mampu menjadi pihak yang solutif bagi permasalahan yang dialami negara lain. Bantuan Jepang digolongkan berkualitas tinggi tersebut terbentuk karena pengalaman yang telah dimiliki Jepang dalam waktu yang panjang menangani bencana alam. Pengalaman-pengalaman itu dapat terlihat dari bangkitnya Jepang pasca perang dunia kedua serta kerusakan akibat bencana yang sering terjadi sehingga membangun komitmen Jepang untuk dapat berkontribusi secara lebih di dunia internasional yang dirasa membutuhkan perannya.

Pasca tragedi gempa dan tsunami yang melanda Aceh, secara cepat Jepang langsung menawarkan sejumlah bantuan cepat tanggap untuk Indonesia. Jepang yang dikenal sangat fokus pada *disaster management* melihat hal tersebut sebagai peluang untuk berkontribusi dalam penanggulangan bencana alam dikancah internasional. Dalam merealisasikan misi kemanusiannya, Jepang mengajak negara-negara lain untuk mengikuti forum internasional yang diusulkan yaitu “*Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015*”. Rencana aksi ini adalah lanjutan dari rencana aksi Jepang yang sebelumnya telah dilaksanakan yaitu “*Yokohoma Strategy*”. HFA secara substansial berfungsi untuk mengurangi kerugian akibat bencana dari 2005-2015 dengan membangun ketahanan bangsa dan masyarakat terhadap bencana.

Agar dapat membangun citra negara yang baik, Jepang tentu saja menuntaskan kewajiban dengan mengaplikasikan seluruh hasil dari *Hyogo Framework* dalam ikut menangani bencana gempa dan tsunami di Aceh sebagai daerah yang tertimpa bencana alam. Distribusi bantuan yang diberikanpun dilaksanakan berdasarkan pola *disaster management* yang direncanakan oleh diplomasi kebencanaan Jepang.

Dalam kaitannya dengan bencana gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004, bentuk bantuan yang diberikan oleh Jepang cukup beragam yaitu bantuan dalam bentuk logistik (barang), rekonstruksi, serta bantuan tentang ilmu kebencanaan. Jepang juga melakukan pelatihan praktik penanganan bencana kepada masyarakat Aceh atas kerja sama *Japanese Red Cross Society (JRCS)* dan Palang Merah

Indonesia (PMI). Tujuan pelatihan ini adalah membentuk masyarakat yang tahan bencana serta membuat sistem manajemen bencana berbasis masyarakat dengan memanfaatkan jalur darurat bila bencana terjadi. Jepang juga memberikan bantuan tentang evakuasi (cara melarikan diri) dari bencana, penanganan pengobatan dan semua strategi dalam antisipasi bencana. Pemerintah Jepang juga mendirikan sekolah-sekolah serta rumah warga bagi warga Aceh. Selama masa darurat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, Jepang sangat fokus dalam memberikan bantuan rehabilitasi infrastruktur dasar, mendukung seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, peningkatan layanan sosial dan publik, serta pembangunan kembali masyarakat di Aceh.

Dari sisi politik dalam memberikan dan menyalurkan bantuan, Jepang menggunakan politik kebencanaan guna menularkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan kepada warga Aceh hingga akhirnya mengakar dan menjadi budaya masyarakat Aceh. Politik kebencanaan dapat dilihat bagaimana Jepang mengontrol Indonesia dengan menggunakan kekuatan bantuan yang dimilikinya, antara lain pembuatan radio dan jembatan di Aceh, pembukaan kantor perwakilan Jepang di Aceh, hingga pembuatan Perpres karena di desak oleh pihak Jepang. Selanjutnya juga ada nya Politik-Ekonomi yang dilakukan oleh Jepang, dapat dilihat dari bagaimana Jepang selain memberikan bantuan mereka juga mempromosikan barang-barang yang di produksi oleh Jepang. Melihat kesempatan ini, Jepang mendapat keuntungan yang besar karena Indonesia telah berketergantungan oleh barang produksi negeri sakura tersebut dan secara tidak langsung telah membantu di bidang ekonomi dan perang dagang. Melalui penerapan sistem pengelolaan dan pelaksanaan program, Jepang berhasil membuat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara faktor ekonomi dan faktor politik dengan menggunakan substansi ekonomi politik dan menggunakan pendekatan ekonomi politik yang mencakup variable-variabel politik, ekonomi serta sosial budaya hingga mempengaruhi faktor-faktor yang meliputi intervensi pemerintah, perubahan kebijakan dan tindakan politik.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa bantuan Jepang yang diberikan kepada Indonesia khususnya melalui Aceh pasca tsunami tahun 2004 memiliki motif tersendiri, yang

dapat dilihat dari upaya politisasi oleh pihak Jepang dalam penanggulangan bencana alam di dunia internasional yang tercermin dari *controlling* melalui program-program rekonstruksi. Selain itu, Jepang juga menggunakan kesempatan ini untuk melakukan promosi negara dengan menyisipkan atau menyebarkan nilai serta norma Jepang di Indonesia yang tercermin dari kesepakatan yang berdasarkan desakan-desakan dari pemerintahan Jepang. Dampak jangka panjang yang terlihat adalah orma-norma yang diterapkan oleh Jepang tertanam dalam budaya atau kebiasaan sehari-hari warga setempat hingga saat ini.

Tidak hanya itu saja, dari sisi ekonomi Jepang juga menjadikan momen ini sebagai kesempatan mempromosikan barang-barang atau logistik yang berasal dari Jepang ke Indonesia seperti alat berat, alat komunikasi dan peralatan lainnya yang bermerek Jepang. Diplomasi bencana ini juga dijadikan oleh Jepang sebagai kesempatan untuk memberikan citra yang baik di mata dunia. Keuntungan dari kerjasama ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintahan Indonesia saja, tetapi juga oleh negara-negara penerima bantuan lainnya. Dalam perumusannya tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai salah satu upaya *soft diplomacy* oleh Jepang dengan menggunakan instrumen bantuan luar negeri dengan memadukannya dengan keuntungan Ekonomi-Politik yang telah di bahas secara rintis diatas. Tindakan ini sekaligus membuktikan bahwa diplomasi bukan hanya dilakukan dengan cara-cara yang tradisional, namun isu kontemporer (*non-traditional*) pun dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan diplomasi. Salah satunya hal itu dibuktikan oleh Jepang dengan menggunakan isu kebencanaan sebagai alat diplomasi terhadap negara-negara lain.

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi guna memberikan pemahaman baru tentang dunia diplomasi. Penelitian ini terfokus dalam membahas *landscape* politik terkait bantuan Jepang yang direalisasikan melalui *disaster diplomacy*, oleh karena itu isu ini masih memerlukan kajian yang lebih mendalam terkait efektivitas pasca penyaluran bantuan antar lain: efek perekonomian pasca bantuan, serta hal-hal yang teknis lainnya. Sebagai saran, dikarenakan Jepang sebagai subjek dari penelitian ini selaku aktor yang berkepentingan sebagai pendonor, untuk itu perlu dikaji dari sisi Indonesia sebagai subjek untuk diteliti lebih lanjut

sebagai penerima bantuan luar negeri. Selain itu masih perlu dikaji selanjutnya respon dan langkah dari pihak Indonesia (BRR) dalam menghadapi situasi politik ketika mengalami polemik yang serupa.